

MAKRO

Dana Pemda “Parkir” Di Bank Naik Terus

NERACA

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat dana Pemerintah Daerah (Pemda) diperbankan mengalami kenaikan secara signifikan. Hingga akhir Juni 2022, tercatat mencapai Rp220,9 triliun atau meningkat Rp20,95 triliun (10,06%) dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp200,75 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut angka ini menjadi yang tertinggi dalam enam bulan terakhir. “Pemerintah daerah masih memiliki dana di perbankan yang masih sangat tinggi atau meningkat terus, sampai Juni ini mencapai Rp220,9 triliun, ini tertinggi dalam enam bulan terakhir,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip Antara, kemarin.

Endapan dana pemerintah daerah di perbankan membuat pemerintah pusat dilema saat hendak mempercepat transfer ke daerah dan menyalurkan dana desa. “Jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kita berharap akselerasi pemerintah daerah di semester dua ini dari sisi belanja akan bisa dipicu dengan baik untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi-ekonomi di daerah,” ujarnya.

Sri Mulyani menyebutkan sampai akhir Juni 2022 realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen terhadap APBN 2022. Kenaikan saldo dana pemerintah di perbankan antara lain disebabkan oleh realisasi belanja daerah yang sampai Juni 2022 belum optimal. ● bari

Satu Nafas Ekonomi Nasional dan Syariah

NERACA

Jakarta – Kebijakan ekonomi syariah harus selaras dan beriringan dengan kebijakan ekonomi nasional. Karena dengan begitu, akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu seperti disampaikan oleh

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman dalam Upacara Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Indonesia Timur Indonesia di Makassar yang dilaksanakan secara daring, di Jakarta, Kamis (28/7). “Mengapa ini penting? karena ekonomi syariah tidak terlepas dari ekonomi nasional, kita satu nafas, hanya yang berbeda adalah akadnya, caranya,” katanya. Aida mengatakan sektor usaha aktivitas syariah di kuartal 1 tumbuh 4,73 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Kinerja baik tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang tengah berada dalam kondisi cukup baik dengan inflasi yang masih terjaga.

“Ke depannya kita perkuat dan bisnis model ekonomi syariah ini mengantun nilai yang universal dan ‘rahmatan lil alamin’, itu yang paling penting dan kemudian juga tentang terhadap siklus ekonomi dan mempunyai penetrasi yang kuat kepada ekonomi daerah,” ujarnya.

Sinergi dan kolaborasi, menurut dia, menjadi kunci penting agar ekonomi syariah bisa senantiasa menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara khusus, Festival Ekonomi Syariah di Kawasan Timur Indonesia atau Fesyar KTI diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi syariah yang akan meningkatkan pasokan dan daya beli masyarakat serta mendukung upaya mitigasi

dari bahaya inflasi. Lebih lanjut Aida menyampaikan agar ekonomi syariah diperkuat kelembagaan melalui rantai nilai halal atau RNH yang dilakukan secara end to end dengan memperhatikan sektor dan program unggulan.

Bank Indonesia menilai, selain pengembangan bisnis dari hulu ke hilir, ekonomi syariah juga harus memperhatikan kualitas dan pembiayaan yang tidak hanya pembiayaan komersial namun juga pembiayaan sosial seperti Ziswaf. “Indonesia itu ternyata world giving indeksnya itu tertinggi di dunia, jadi Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Inilah yang mesti kita banggakan lebih lanjut,” katanya.

Dalam ekosistem RNH, Indonesia mempunyai lima sektor unggulan namun berfokus pada dua sektor yakni makanan halal dan fesyen muslim karena saat ini posisi Indonesia pada kedua sektor tersebut berada pada ranking 2 dan ranking 3. Sementara untuk program unggulan, BI telah mengembangkan program Industri Kreatif Syariah Indonesia agar bisa bersaing di pasar global. Lalu ada program penguatan kelembagaan pesantren melalui Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren).

“Dengan bangga kami menyampaikan bahwa Fesyar KTI ini upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat semua pelaku usaha syariah kita bisa mempunyai daya saing di dunia global kemudian juga bisa memanfaatkan tren digitalnya,” jelasnya.

Sedangkan dalam upaya mengembangkan digitalisasi ekonomi syariah, Bank Indonesia senantiasa mendorong pemanfaatan teknologi digital. ● bari

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Likuidator PT. RIFF DIGITAL INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan mengumumkan bahwa pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham.

Hormat kami,
Jakarta, 29 Juli 2022
PT. RIFF DIGITAL INDONESIA
(dalam likuidasi)
Ttd
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Akhir Likuidasi dan Pembebasan Tanggung Jawab Likuidator
PT CATURSURYA GEMILANG
(dalam Likuidasi)

Likuidator **PT CATURSURYA GEMILANG** (dalam Likuidasi), berkedudukan di Kab. Sukabumi, yang Pembubarannya diterima Ditjen AHU dalam surat tgl. 23-02-2022, No. : AHU-AH.01.10-0015279, mengumumkan:

Bahwa Para Pemegang Saham menerima dengan baik hasil akhir likuidasi dan memberikan acquit et de charge pada Likuidator sesuai Akta tgl. 27-07-2022, No. 17, yang dibuat Notaris ADRIAN ADIPUTRA PERMANA, S.H., M.Kn.

Demikian hal ini diumumkan memenuhi Pasal 152 UUPF.

TAN ROBERT YULIANTO T.
(Likuidator Perseroan)
29 Juli 2022

PENGUMUMAN TENTANG PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DAN PENGAKHIRAN PKPU PT. PRATAMA BERSAMA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 288 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/Pdt.Sus-PKU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 4 November 2021, tentang Pengesahan Perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Pratama Bersama, yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 77, Wisma 77 Gedung 1, Lantai 8, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, yang amar putusannya sebagai berikut:

- MENGADILI:**
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap TERMOHON PKPU / PT. Pratama Bersama beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 77, Wisma 77 Gedung 1, Lantai 8, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat berakhir karena perdamaian;
 - Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON PKPU dengan Para Kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2021 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU dan Para Kreditor;
 - Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;
 - Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
 - Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp 9.955.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Oleh karena Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) telah berkekuatan hukum tetap, maka kami beritahukan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Pratama Bersama TELAH BERAKHIR.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT. Pratama Bersama
TTD
Ex. Tim Pengurus

bank victoria Syariah

PANGGLIAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK VICTORIA SYARIAH

Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK VICTORIA SYARIAH (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 15 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : 1. Virtual meeting menggunakan aplikasi zoom meeting
2. PT. Bank Victoria Syariah
Jedong Graha BIP Lt. 5
Jalan Gatot Subroto, Kav. 23
Kelurahan Karet Semangati, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930 (Offline)

Agenda RUPS Luar Biasa:
• Perubahan Pasal 4 ayat 4 A Anggaran Dasar Perseroan.
Mengenal Ketentuan Pengeluaran Saham dalam Perseroan.

- CATATAN :**
- Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
 - Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah.
 - Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 17.00 WIB di Kantor Perseroan.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas Pendaftaran dan menunjukkan aslinya sebelum memasuki ruangan rapat.
 - Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir ditetapkan Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT. BANK VICTORIA SYARIAH
Direksi.

PT Mapfre Abda Assistance

Berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN SAHAM SAAT INI

Direksi PT Mapfre Abda Assistance (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan mengenai suatu rencana perubahan pemegang saham Perseroan sehingga Aseana Insurance Pte. Ltd., (“Pengambilalih”) akan menjadi pemegang saham pengendali baru Perseroan, yang akan dilakukan melalui pengalihan 510 saham dari MAPFRE Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA kepada Aseana Insurance Pte. Ltd., yang akan merupakan 51% dari saham yang disetor dan ditempatkan oleh Perseroan (“Pengambilalihan”).

Setiap kreditur mempunyai hak untuk menolak Pengambilalihan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah pengumuman ini dengan mengirimkan pemberitahuan keberatan secara tertulis kepada Perseroan di alamat sebagai berikut, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan dasar dari keberatan tersebut:

PT Mapfre Abda Assistance
Plaza Kelapa Gading (Inkopal), Blok A No. 9.
Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading
North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 hari kalender, rencana Pengambilalihan akan dianggap telah disetujui.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 29 Juli 2022

Direksi
PT Mapfre Abda Assistance

PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEMENTARA

Perkara No. 145/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 145/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2022 dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh:

PT. SAHABAT SEJATI SELALLU, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pinangasia Timur Raya No. 22B, RT.04, RW. 005, Pinangasia, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta (selanjutnya disebut “**PEMOHON PKPU**”);

PT. SRIKANDI MURNI MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pinangasia Timur Raya No. 20, RT.04, RW. 005, Pinangasia, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta (selanjutnya disebut “**TERMOHON PKPU**”); dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
- Menyatakan Termohon PKPU PT. Srikandi Murni Mandiri dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan diucapkan;
- Mengukuhkan **DR. DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat:

- Risha Shindyani Halim, S.H.**, Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-353. AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, ber Kantor di Wisma Gajah Blok AG-AF, Lantai 2, Jalan Dr. Sahrdjito Kav.11, Jember, Jakarta Selatan;
- Atik Mujali, S.H.**, Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-4. AH.04.03-2022 tanggal 31 Januari 2022, ber Kantor di Consigliere & Co Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H JI. Casablanca Raya Kav.88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan-12870

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses kepailitan.

- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon PT. Srikandi Murni Mandiri dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di jalan Bungur Besar Raya No. 24-28, Jakarta Pusat;
- Mengalihkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- Menagihkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 145/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juli 2022, Hakim Pengawas telah menetapkan antara lain:

- Rapat Kreditor Pertama akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Batas akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor sampai dengan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, setiap hari kerja sampai dengan pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Pengurus dengan alamat Consigliere & Co Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H JI. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan 12870.
- Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut, maka dengan ini kami mengundang **PT. SRIKANDI MURNI MANDIRI** (dalam PKPU Sementara), Para Kreditor dan Kantor Pajak yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dan rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, serta mengajukan tagihan (jika ada) kepada Tim Pengurus dengan alamat Consigliere & Co Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H JI. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan 12870. Email : timpengurus@srikandi145@gmail.com baik secara langsung maupun melalui pos tercatat dengan memperhatikan ketentuan tentang batas waktu pengajuan tagihan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas.

Jakarta, 29 Juli 2022
Tim Pengurus PT. SRIKANDI MURNI MANDIRI (Dalam PKPU Sementara)
TTD
Risha Shindyani Halim, S.H. Atik Mujali, S.H.

PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEMENTARA

Perkara Nomor: 146/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 146/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2022 dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh:

INDRA, lahir di Tangerang pada tanggal 18 November 1973, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Puri Barati 6 No. 4 Kel. Puri, Kec. Pejangeran, Jakarta Utara. NIK : 317303181730002 (selanjutnya disebut “**PEMOHON PKPU**”);

PT. YOSTIANA ESA MANDIRI, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kebahagiaan No. 81, RT.006 RW.001, Krutuk - Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta (selanjutnya disebut “**TERMOHON PKPU**”), dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU **INDRA** terhadap TERMOHON PKPU **PT. YOSTIANA ESA MANDIRI**;
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan, terhadap TERMOHON PKPU **PT. YOSTIANA ESA MANDIRI**, yang berkedudukan di Jalan Kebahagiaan No.81 RT.006 RW.001, Krutuk - Taman Sari Barati, Prop. DKI Jakarta;
- Menunjuk **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengurus untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU **PT. YOSTIANA ESA MANDIRI**;
- Menunjuk dan mengangkat:

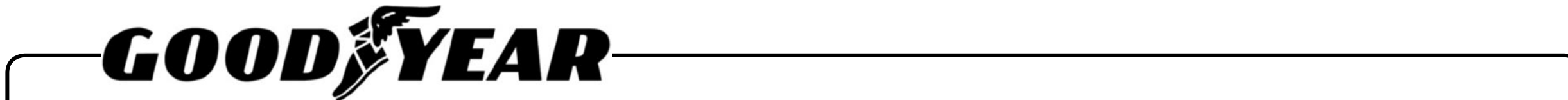
- TEGUH NUGROHO ADI, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-621.AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021 yang ber Kantor di Jl. Warung Muncang No.30, RT.006, RW.001 Kel.Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Bandung.
- MARTINI NATALOVA SITORUS, S.H.**, Kurator & Pengurus Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-5. AH.04.03-2022, tanggal 03 Februari 2022 beralamat di **Consigliere & Co Law Firm**, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H, JI. Casablanca Raya Kav.88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan-12870;
- Sebagai Pengurus dalam PKPU tersebut dan sebagai KURATOR dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit;
- Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari, Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- Mengalihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 146/Pdt.Sus-PKU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juli 2022, Hakim Pengawas telah menetapkan antara lain:

- Rapat Kreditor Pertama akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Batas akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor sampai dengan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, setiap hari kerja sampai dengan pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Pengurus dengan alamat Consigliere & Co Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H JI. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan 12870.
- Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan Para Kreditor pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selubungan dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut, maka dengan ini kami mengundang **PT. YOSTIANA ESA MANDIRI** (dalam PKPU Sementara), Para Kreditor dan Kantor Pajak yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim dan rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, serta mengajukan tagihan (jika ada) kepada Tim Pengurus dengan alamat Consigliere & Co Law Firm, EightyEight@Kasablanka Office Tower 12th Floor, Unit A&H JI. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam-Tebet, Jakarta Selatan 12870. Email : timpengurus@ytem146@gmail.com baik secara langsung maupun melalui pos tercatat dengan memperhatikan ketentuan tentang batas waktu pengajuan tagihan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas.

Jakarta, 29 Juli 2022
Tim Pengurus PT. YOSTIANA ESA MANDIRI (Dalam PKPU Sementara)
TTD
TEGUH NUGROHO ADI, S.H. MARTINI NATALOVA SITORUS, S.H.



LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021		2022	2021
ASET			LIABILITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas	8.520.981	12.360.240	Utang usaha	36.413.457	34.033.679
Piutang usaha	-	-	- Pihak ketiga	4.049.010	5.052.198
- Pihak ketiga	3.117.987	2.441.590	- Pihak berelasi	14.184.649	3.026.823
- Pihak berelasi	13.036.972	9.167.870	Utang lain-lain	-	-
Piutang lain-lain	-	-	- Pihak ketiga	7.158.996	8.171.585
- Pihak ketiga	251.090	121.497	- Pihak berelasi	3.284.553	3.645.029
- Pihak berelasi	457.816	281.945	Uang muka	-	-
Persediaan	24.575.858	23.725.804	- Pihak ketiga	769.497	713.714
Pajak pertambahan nilai	-	-	- Pihak berelasi	4.049.010	5.052.198
dibayar di muka	1.445.020	1.050.545	Pinjaman jangka pendek	14.103.500	9.415.000
Beban dibayar di muka	775.344	704.924	Akrual	5.703.032	5.860.806
Aset lancar lain-lain	692.856	494.890	Utang pajak lain-lain	245.803	269.755
Jumlah aset lancar	52.873.924	50.349.305	Utang dividen	35.934	37.544
			Bagian jangka pendek dari		
ASET TIDAK LANCAR			liabilitas jangka panjang		
Aset pajak tangguhan	4.126.306	3.831.982	- Provisi garansi produk	231.187	215.661
Aset tetap	59.751.447	60.586.569	- Liabilitas sewa pembiayaan	358.927	374.396
Aset takberwujud	203.455	188.400	- Kewajiban imbalan kerja	85.942	23.710
Aset hak guna	507.748	705.390	Jumlah liabilitas jangka pendek	76.624.487	70.839.900
Tagihan atas restitusi pajak	-	-	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
- Pajak penghasilan badan	5.673.562	3.706.461	Liabilitas jangka panjang, setelah		
- Pajak lain-lain	121.908	86.594	dikurangi bagian jangka pendek:		
Aset tidak lancar lain-lain	443.593	479.903	- Provisi garansi produk	223.341	118.355
Jumlah aset tidak lancar	70.828.019	69.585.299	- Liabilitas sewa pembiayaan	235.367	418.016
JUMLAH ASET	123.701.943	119.934.604	- Kewajiban imbalan kerja	242.797	201.971
			Jumlah liabilitas jangka panjang	701.505	738.342
			JUMLAH LIABILITAS	77.325.992	71.578.242
			EKUITAS		
			Modal saham, modal dasar, ditempatkan		
			dan disetor penuh –		
			410.000.000 lembar saham		
			bersisa dengan nilai nominal		
			Rp 100 per lembar saham	78.378.525	78.378.525
			Dicadangkan	80.991	80.991
			- Belum dicadangkan	42.424.523	44.404.934
			Penyesuaian penjabaran kumulatif	(74.508.088)	(74.508.088)
			Jumlah ekuitas	46.375.951	48.356.362
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	123.701.943	119.934.604

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE-PERODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo laba	Penyesuaian penjabaran kumulatif	Jumlah	
Saldo 1 Januari 2021	78.378.525	80.991	41.126.680 (74.508.088)	45.078.108
Lab periode berjalan	-	-	3.529.202	- 3.529.202
Saldo 30 Juni 2021	78.378.525	80.991	44.655.882 (74.508.088)	48.607.310
Saldo 1 Januari 2022	78.378.525	80.991	41.126.680 (74.508.088)	45.078.108